



# BPK Awasi Kredit Macet

## ■ Pemberian Kredit Berpotensi Masalah

**JAKARTA, TRIBUN** - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengeluarkan ikhtisar hasil pemeriksaan semester I 2017. Dalam temuan ini BPK menyoroti dugaan kerugian negara dalam beberapa institusi pemerintah termasuk bank BUMN.

Dari beberapa BUMN yang disoroti oleh BPK adalah terkait kredit bermasalah atau *non performing loan* (NPL) PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI) dan PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN) yang diduga tidak sesuai dengan ketentuan.

Hasil pemeriksaan BPK terhadap PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI) misalnya menemukan bahwa pemberian fasilitas kredit modal kerja kepada PT TRIO senilai Rp 1,33 triliun berpotensi macet.

### Karena tidak sesuai dengan ketentuan

**Moermahadi Soerja Djanegara**  
Ketua BPK

"Karena tidak sesuai dengan ketentuan," kata Moermahadi Soerja Djanegara, Ketua BPK dalam temuannya, Selasa (3/10).

Hasil pemeriksaan BPK menunjukkan bahwa pengelolaan operasional pendapatan, biaya dan investasi BUMN belum sepenuhnya sesuai dengan sistem pengendalian intern perusahaan dan ketentuan perundangan.

Selain itu BPK juga me-

temukan bahwa BTN juga belum proaktif mengajukan potensi klaim asuransi kredit macet senilai Rp 366 miliar.

Hal ini karena menurut Moermahadi, BTN belum sepenuhnya melaporkan monitoring hasil realisasi klaim asuransi kredit macet yang telah terbayar.

### Paparan OJK

Sebelumnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memaparkan sampai dengan bulan Agustus 2017, rasio kredit bermasalah atau NPL gross perbankan sudah menyentuh angka 3,05%. Jumlah tersebut meningkat tipis dibandingkan dengan rasio NPL bulan sebelumnya sebesar 3%.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Heru Kristiyana mengatakan, meski terjadi kenaikan NPL jumlah kenaikan tersebut masih dinilai wajar. Hal ini menurutnya, berkaitan dengan telah dicabutkan relaksasi restrukturisasi kredit beberapa waktu lalu.

"NPL tidak naik, secara gross 3,05% sementara secara net masih 1,29%. Masih bagus, tidak ada sesuatu yang dikhawatirkan karena kenaikannya kecil," ujar Heru saat ditemui di Jakarta, Rabu (27/9) malam.

Lebih lanjut, Haru menambahkan penghapusan relaksasi restrukturisasi tidak berdampak signifikan terhadap kenaikan risiko kredit sampai akhir tahun. Pasalnya, mayoritas bank sudah memupuk pencadangan untuk memitigasi potensi kenaikan kredit macet. **(kontan)**